



RENJA

Th. 2024

Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau Kalimantan Utara tahun 2024 dapat tersusun.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintah khususnya di bidang Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu tahun 2024 dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.



Kepala Dinas,

Makson, S.Sos., MM, MH
NIP. 196507101998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I. PENDAHULUAN ii

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4. Sistematika Penyusunan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah 6

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 31

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 51

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 51

 3.2. Tujuan sasaran, Program dan Rencana Kerja SKPD 53

 3.3. Program dan Kegiatan..... 57

BAB IV. PENUTUP 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana kerja (RENJA) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahun yang tertuang dalam Renstra SKPD kedalam Perencanaan yang sifatnya lebih operasional.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD defenitif. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu; tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD megacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan penyusunan perencanaan yang baik tentunya berangkat dari permasalahan yang ada dan berdasarkan data serta Informasi, dimana Perencanaan merupakan suatu proses manajemen dan kebijakan yang merupakan tahap awal dari proses pembangunan .

Sebagai Dokumen SKPD, Renja mempunyai fungsi yang sangat strategis yaitu sarana perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai Implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi daerah, yang pada dasarnya

merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
11. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Utara No 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1)
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2).
13. Peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2013 Tentang Penyerahan urusan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
17. Peraturan Bupati Malinau tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 Nomor 28.1 Tahun 2021

18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 tahun 2023 tertanggal tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran DKPPKB Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja ini adalah menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Tahun 2022 telah maksimal. Adapun beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan beberapa kendala, diantaranya yaitu mundurnya jadwal kegiatan dikarenakan Pandemi Covid-19. Akan tetapi pada tahun 2022, kasus covid-19 di Kabupaten Malinau sudah nol, oleh karena itu pelaksanaan renja 2024 akan lebih maksimal.

Pada Tabel T-C. 29 dibawah ini disajikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel. T-C. 29
Repitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB)	0 KH	Rp. 107.287.722.579		Rp. 0	13 KH	Rp. 50.544.598.099		Rp. 7.219.038.008		14,28 %		Rp. 7.219.038.008		6,73 %
				Angka Kematian Ibu (AKI)		0 KH	200 KH													
				Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)		80 %	80 %													
				Persentase Balita Gizi Kurang		0 %	0 %													
				Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH		10 KH	12 KH													
				Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH		181 KH	185 KH													
				Persentase Balita Gizi Kurang		15 % (Kurang Dari)	15 % (Kurang Dari)													
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	jumlah unit puskesmas dengan ruang bersalin yang dibangun	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	2 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Transfusi Darah yang dibangun	0 Unit	Rp. 1.366.667.577	0 Unit	Rp. 0	1 Unit	Rp. 1.366.667.577	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	jumlah unit rumah dinas medis dan paramedis yang direhab	0 Unit	Rp. 227.216.133	0 Unit	Rp. 0	2 Unit	Rp. 227.216.133	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB tersedia	0 Dokumen	Rp. 331.115.000	0 Dokumen	Rp. 0	2 Dokumen	Rp. 331.115.000	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
						jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	0 dokumen	Rp. 44.000.000	0 dokumen	Rp. 0	2 dokumen	Rp. 44.000.000	0 dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan pengadaan prasarana dan pendukung faskes	0 Puskesmas	Rp. 7.235.412.000	0 Puskesmas	Rp. 0	9 Puskesmas	Rp. 7.235.412.000	6 Puskesmas	Rp. 0	66,67 %	0,00 %	6 Puskesmas	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Faskes dengan ketersediaan ALKES	0 faskes	Rp. 7.397.343.025	0 faskes	Rp. 0	20 faskes	Rp. 7.397.343.025	15 faskes	Rp. 1.002.117.220	75,00 %	13,55 %	15 faskes	Rp. 1.002.117.220	0,00 %	13,55 %
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah faskes dengan ketersediaan Obat dan Vaksin	0 Faskes	Rp. 2.423.869.338	0 Faskes	Rp. 0	20 Faskes	Rp. 2.423.869.338	0 Faskes	Rp. 12.376.200	0,00 %	0,51 %	0 Faskes	Rp. 12.376.200	0,00 %	0,51 %
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Faskes dengan ketersediaan BHP	0 Faskes	Rp. 1.359.228.342	0 Faskes	Rp. 0	20 Faskes	Rp. 1.359.228.342	0 Faskes	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Faskes	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes yang mendapat perawatan ALKES	0 faskes	Rp. 170.000.000	0 faskes	Rp. 0	8 faskes	Rp. 170.000.000	8 faskes	Rp. 23.284.800	100,00 %	13,70 %	8 faskes	Rp. 23.284.800	0,00 %	13,70 %

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil di dinkes	0 Kegiatan	Rp. 315.024.121	0 Kegiatan	Rp. 0	5 Kegiatan	Rp. 315.024.121	0 Kegiatan	Rp. 56.218.800	0,00 %	17,85 %	0 Kegiatan	Rp. 56.218.800	0,00 %	17,85 %
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0 Kegiatan	Rp. 136.735.000	0 Kegiatan	Rp. 0	3 Kegiatan	Rp. 136.735.000	0 Kegiatan	Rp. 5.380.000	0,00 %	3,93 %	0 Kegiatan	Rp. 5.380.000	0,00 %	3,93 %
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	0 Jenis	Rp. 60.670.000	0 Jenis	Rp. 0	2 Jenis	Rp. 60.670.000	0 Jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan	0 Persen	Rp. 385.000.000	0 Persen	Rp. 0	100 Persen	Rp. 385.000.000	82 Persen	Rp. 239.810.600	82,00 %	62,29 %	82 Persen	Rp. 239.810.600	0,00 %	62,29 %
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kebutuhan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0 Jenis	Rp. 650.000.000	0 Jenis	Rp. 0	11 Jenis	Rp. 650.000.000	3 Jenis	Rp. 40.365.000	27,27 %	6,21 %	3 Jenis	Rp. 40.365.000	0,00 %	6,21 %
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah desa dengan penanganan dan pencegahan stunting	0 Desa	Rp. 686.637.600	0 Desa	Rp. 0	15 Desa	Rp. 686.637.600	7 Desa	Rp. 270.984.354	46,67 %	39,47 %	7 Desa	Rp. 270.984.354	0,00 %	39,47 %
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Jenis	Rp. 140.081.600	0 Jenis	Rp. 0	1 Jenis	Rp. 140.081.600	0 Jenis	Rp. 77.908.000	0,00 %	55,62 %	0 Jenis	Rp. 77.908.000	0,00 %	55,62 %
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Jenis	Rp. 105.742.300	0 Jenis	Rp. 0	2 Jenis	Rp. 105.742.300	0 Jenis	Rp. 67.579.000	0,00 %	63,91 %	0 Jenis	Rp. 67.579.000	0,00 %	63,91 %
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	0 Persen	Rp. 122.656.680	0 Persen	Rp. 0	71 Persen	Rp. 122.656.680	53 Persen	Rp. 67.012.150	74,65 %	54,63 %	53 Persen	Rp. 67.012.150	0,00 %	54,63 %
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	0 Bulan	Rp. 552.827.181	0 Bulan	Rp. 0	12 Bulan	Rp. 552.827.181	9 Bulan	Rp. 176.939.856	75,00 %	32,01 %	9 Bulan	Rp. 176.939.856	0,00 %	32,01 %
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah peserta PBI, peserta PBPu dan kelas mandiri mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan	0 jiwa	Rp. 11.045.050.800	0 jiwa	Rp. 0	35.000 jiwa	Rp. 11.045.050.800	28.114 jiwa	Rp. 5.179.062.028	80,33 %	46,89 %	28.114 jiwa	Rp. 5.179.062.028	0,00 %	46,89 %
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah faskes melaksanakan pelayanan kesehatan	0 faskes	Rp. 4.500.000.000	0 faskes	Rp. 0	19 faskes	Rp. 4.500.000.000	10 faskes	Rp. 0	52,63 %	0,00 %	10 faskes	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Re Akreditasi	0 Puskesmas	Rp. 352.450.000	0 Puskesmas	Rp. 0	5 Puskesmas	Rp. 352.450.000	0 Puskesmas	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Puskesmas	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi															
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah kebutuhan pengelolaan sistem informasi kesehatan	0 Jenis	Rp. 274.038.975	0 Jenis	Rp. 0	3 Jenis	Rp. 274.038.975	3 Jenis	Rp. 0	100,00 %	0,00 %	3 Jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
															32,51	17,11			0	17,11
															SR	SR			SR	SR

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Faskes	85 %	Rp. 21.248.500.039		Rp. 0	81 %	Rp. 20.462.980.739		Rp. 14.065.082.500		68,73 %		Rp. 14.065.082.500		66,19 %
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota															
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tenaga PTT Daerah dan tenaga kontrak khusus yang diberikan insentif	0 Orang	Rp. 18.609.183.919	0 Orang	Rp. 0	500 Orang	Rp. 18.609.183.919	0 Orang	Rp. 14.065.082.500	0,00 %	75,58 %	0 Orang	Rp. 14.065.082.500	0,00 %	75,58 %
															0	75,58			0	75,58
															SR	T			SR	T
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kecamatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan yang diadakan	100 Persen	Rp. 2.762.556.140		Rp. 0	100 Persen	Rp. 2.255.861.140		Rp. 31.825.000		1,41 %		Rp. 31.825.000		1,15 %
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Jenis	Rp. 165.425.000	0 Jenis	Rp. 0	4 Jenis	Rp. 165.425.000	3 Jenis	Rp. 31.825.000	75,00 %	19,24 %	3 Jenis	Rp. 31.825.000	0,00 %	19,24 %
															75	19,24			0	19,24
															S	SR			SR	SR
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57 Indeks	Rp. 236.616.600		Rp. 0	57 Indeks	Rp. 73.416.600		Rp. 22.800.000		31,06 %		Rp. 22.800.000		9,640000000000001 %
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	jumlah kartu kelahiran yang dicetak	0 lembar	Rp. 1.895.000	0 lembar	Rp. 0	379 lembar	Rp. 1.895.000	379 lembar	Rp. 0	100,00 %	0,00 %	379 lembar	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	jumlah kebutuhan pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	0 jenis	Rp. 71.521.600	0 jenis	Rp. 0	5 jenis	Rp. 71.521.600	3 jenis	Rp. 22.800.000	60,00 %	31,88 %	3 jenis	Rp. 22.800.000	0,00 %	31,88 %
															80	15,94			0	15,94
															T	SR			SR	SR

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kecamatan yang melaksanakan program KB	53 %	Rp. 2.885.354.700		Rp. 0	53 %	Rp. 1.366.074.700		Rp. 380.585.600		27,86 %		Rp. 380.585.600		13,19 %
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal															
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kebutuhan Advokasi Program KKBPK	0 jenis	Rp. 4.375.000	0 jenis	Rp. 0	3 jenis	Rp. 4.375.000	3 jenis	Rp. 0	100,00 %	0,00 %	3 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Program KKBPK	0 jenis	Rp. 25.000.000	0 jenis	Rp. 0	1 jenis	Rp. 25.000.000	1 jenis	Rp. 24.750.000	100,00 %	99,00 %	1 jenis	Rp. 24.750.000	0,00 %	99,00 %
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah media promosi dan KIE Program KKBPK yang tersedia	0 jenis	Rp. 70.640.000	0 jenis	Rp. 0	4 jenis	Rp. 70.640.000	4 jenis	Rp. 69.685.600	100,00 %	98,65 %	4 jenis	Rp. 69.685.600	0,00 %	98,65 %
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	jumlah kebutuhan Rakorcam, Rakordes dan minlok pelaksanaan program KKBPK	0 jenis	Rp. 234.000.000	0 jenis	Rp. 0	3 jenis	Rp. 234.000.000	2 jenis	Rp. 900.000	66,67 %	0,38 %	2 jenis	Rp. 900.000	0,00 %	0,38 %
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluh yang mendapatkan biaya operasional	0 Balai	Rp. 81.000.000	0 Balai	Rp. 0	2 Balai	Rp. 81.000.000	0 Balai	Rp. 1.400.000	0,00 %	1,73 %	0 Balai	Rp. 1.400.000	0,00 %	1,73 %
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Kebutuhan Pengendalian program KKBPK	0 jenis	Rp. 40.000.000	0 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 40.000.000	0 jenis	Rp. 20.000.000	0,00 %	50,00 %	0 jenis	Rp. 20.000.000	0,00 %	50,00 %
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)															
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pendampingan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Desa	Rp. 523.200.000	0 Desa	Rp. 0	109 Desa	Rp. 523.200.000	0 Desa	Rp. 124.800.000	0,00 %	23,85 %	0 Desa	Rp. 124.800.000	0,00 %	23,85 %
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Kecamatan dengan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	0 kecamatan	Rp. 7.200.000	0 kecamatan	Rp. 0	15 kecamatan	Rp. 7.200.000	0 kecamatan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 kecamatan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta rapat koordinasi dan sosialisasi pelayanan KB	0 orang	Rp. 45.109.700	0 orang	Rp. 0	300 orang	Rp. 45.109.700	0 orang	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 orang	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah kebutuhan pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk jaringan dan jejaring	0 jenis	Rp. 7.800.000	0 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 7.800.000	0 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kecamatan dengan kampung KB yang diberikan biaya operasional	0 kecamatan	Rp. 327.750.000	0 kecamatan	Rp. 0	15 kecamatan	Rp. 327.750.000	4 kecamatan	Rp. 139.050.000	26,67 %	42,43 %	4 kecamatan	Rp. 139.050.000	0,00 %	42,43 %
															35,76	28,73			0	28,73
															SR	SR			SR	SR

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	10 Per 1000 Kelahiran	Rp. 1.610.420.000		Rp. 0	11 Per 1000 Kelahiran	Rp. 563.720.000		Rp. 0		0 %		Rp. 0		0 %
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kebutuhan Operasional bagi pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesehatan keluarga	0 jenis	Rp. 563.720.000	0 jenis	Rp. 0	2 jenis	Rp. 563.720.000	0 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 jenis	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
															0	0			0	0
															SR	SR			SR	SR
X																				
X	XX				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	0 Persen	Rp. 123.715.624.501		Rp. 0	100 Persen	Rp. 51.424.348.799	Rp. 34.368.354.082		66,83 %		Rp. 34.368.354.082		27,78 %	
X	XX	01	2.02																	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN mendapat gaji dan tunjangan tepat waktu	0 Orang	Rp. 50.173.871.217	0 Orang	Rp. 0	7.980 Orang	Rp. 50.173.871.217	410 Orang	Rp. 33.946.161.328	5,14 %	67,66 %	410 Orang	Rp. 33.946.161.328	0,00 %	67,66 %
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kebutuhan bahan logistik kantor	0 Paket	Rp. 213.677.600	0 Paket	Rp. 0	5 Paket	Rp. 213.677.600	2 Paket	Rp. 107.390.000	40,00 %	50,26 %	2 Paket	Rp. 107.390.000	0,00 %	50,26 %
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	0 Jenis	Rp. 128.700.000	0 Jenis	Rp. 0	3 Jenis	Rp. 128.700.000	3 Jenis	Rp. 88.941.000	100,00 %	69,11 %	3 Jenis	Rp. 88.941.000	0,00 %	69,11 %
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	0 kali	Rp. 102.314.982	0 kali	Rp. 0	5 kali	Rp. 102.314.982	4 kali	Rp. 37.829.900	80,00 %	36,97 %	4 kali	Rp. 37.829.900	0,00 %	36,97 %
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 bulan	Rp. 489.280.000	0 bulan	Rp. 0	12 bulan	Rp. 489.280.000	9 bulan	Rp. 155.241.854	75,00 %	31,73 %	9 bulan	Rp. 155.241.854	0,00 %	31,73 %
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	0 Jenis	Rp. 193.480.000	0 Jenis	Rp. 0	25 Jenis	Rp. 193.480.000	24 Jenis	Rp. 20.000.000	96,00 %	10,34 %	24 Jenis	Rp. 20.000.000	0,00 %	10,34 %
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan perizinan	0 Unit	Rp. 106.375.000	0 Unit	Rp. 0	2 Unit	Rp. 106.375.000	2 Unit	Rp. 0	100,00 %	0,00 %	2 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis aset tetap yang dipelihara	0 Jenis	Rp. 16.650.000	0 Jenis	Rp. 0	2 Jenis	Rp. 16.650.000	2 Jenis	Rp. 12.790.000	100,00 %	76,82 %	2 Jenis	Rp. 12.790.000	0,00 %	76,82 %
															74,52	42,86			0	42,86
															S	SR			SR	SR

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinkes PPKB pada Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu :

Tabel. 2.1. Capaian Kerja Dinkes PPKB Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Kinerja 2022	
				Capaian	%
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	185 per 100.000 KH	265 per 100.000 KH	56.76 %
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	12 per 1000 KH	16 per 1000 KH	66.67 %
		Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100%	71.36%	71.36 %
		Prevalensi balita Stunting	<20%	14.93%	100%
2	Terkendalinya angka kelahiran	ASFR Umur 15-19 Tahun	12 per 1000 Kelahiran	25 per 1000 kelahiran	48%

1. Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup tahun 2022 adalah sebanyak 1508, dengan jumlah kematian ibu sebanyak 4 kasus kematian.

Cara perhitungan angka Kematian Ibu (AKI) adalah sebagai berikut :

Angka Kematian Ibu
per 100.000 Kelahiran
Hidup

=

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas
di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

x 100.000

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 tidak sesuai target yang ditetapkan. Target AKI yang ditetapkan adalah AKI dibawah atau sama dengan 185 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan tahun 2022 realisasi AKI adalah 265 per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI yang tinggi di tahun 2022 dikarenakan jumlah kematian ibu pada tahun 2022 di Kabupaten Malinau yaitu sebanyak 4 orang, 3

kematian disebabkan faktor penyakit bawaan ibu yaitu leukimia, jantung dan hipertiroidisme. Sedangkan 1 kematian ibu dikarenakan eklamsia dalam kehamilan. Kasus ini terjadi di Riau , hanya karena ibu hamilnya mempunyai KTP Malinau jadi masuk ke dalam data Malinau. Kematian ibu karena penyakit bawaan sulit untuk di intervensi.

Kegiatan-kegiatan dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) diantaranya yaitu dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, meskipun pada tahun 2022 Kab. Malinau juga terimbas oleh Pandemi Covid-19 sehingga cakupan pelayanan menurun dikarenakan larangan berkumpul di Posyandu. Akan tetapi strategi yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memantau kesehatan ibu hamil cukup baik.

Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu (AKI) selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Malinau Tahun 2018-2022

TAHUN	TARGET	CAPAIAN
2018	225 per 100.000 Kelahiran Hidup	0
2019	220 per 100.000 Kelahiran Hidup	124 per 100.000 Kelahiran Hidup
2020	210 per 100.000 Kelahiran Hidup	62 per 100.000 Kelahiran Hidup
2021	200 per 100.000 Kelahiran Hidup	131 per 100.000 Kelahiran Hidup
2022	185 per 100.000 Kelahiran Hidup	265 per 100.000 Kelahiran Hidup

2. Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian yang terjadi per 1000 kelahiran hidup. AKB tahun 2022 adalah sebesar 16 per 1000 KH sebanyak 24 kasus kematian bayi 0-1 tahun.

Cara perhitungan Angka Kematian Bayi yaitu sebagai berikut :

Angka Kematian Bayi per
1.000 Kelahiran Hidup

=

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yg meninggal
di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

x 1.000

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 di bawah target yang telah ditetapkan. Target AKB pada tahun 2022 yaitu sama dengan atau lebih rendah dari 12 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 16 per 1000 kelahiran hidup.

Untuk AKB, jumlah kematian bayi 24 orang disebabkan oleh hal-hal berikut ini, komplikasi BBLR 9 orang, infeksi 1 orang, covid-19 1 orang, kelainan bawaan 1 orang, pneumonia 3 orang, penyebab lain-lain yang tidak ada dalam klasifikasi/tidak diketahui berjumlah 10 orang. Semua bayi meninggal di RSUD, 22 orang meninggal di RSUD Kab. Malinau, 1 orang meninggal di RSUD Kupang, dan 1 orang di RSUD Sulawesi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menekan Angka Kematian Bayi (AKB) bersumber dari dua dana yaitu APBD dan Dana Alokasi Khusus(DAK). Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB dalam memantau perkembangan bayi dan balita adalah dengan melaksanakan pemantauan ke rumah-rumah warga yang memiliki bayi, karena seperti kita ketahui Posyandu balita di Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 terbatas untuk pelaksanaannya. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerbitkan Standar Operasional Procedure (SOP) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Berikut ini adalah tabel perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Malinau selama 5 tahun terakhir.

Tabel Angka Kematian Bayi (AKB) di Kab. Malinau Tahun 2018-2022

TAHUN	TARGET	CAPAIAN
2018	19 per 1000 Kelahiran Hidup	11 per 1000 Kelahiran Hidup

2019	17 per 1000 Kelahiran Hidup	17 per 1000 Kelahiran Hidup
2020	15 per 1000 Kelahiran Hidup	11 per 1000 Kelahiran Hidup
2021	13 per 1000 Kelahiran Hidup	9 per 1000 Kelahiran Hidup
2022	12 per 1000 Kelahiran Hidup	16 per 1000 Kelahiran Hidup

3. Indikator Kinerja Utama Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan realisasi 12 (dua belas) indikator SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target Capaian Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan adalah 100 persen (%).

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SPM	TARGET SPM	CAPAIAN SPM 2022
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	78.13%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	73.91%

3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	100%	73.98%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	72.65%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	65.35%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	79.69%
7	Cakupan Pelayanan pada Usia Lanjut	100%	53.96%
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	76.62%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	100%	76.68%
10	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa	100%	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100%	44.29%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	61.04%

Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan yaitu Cakupan pelayanan Kesehatan SPM dibagi 12 (dua belas) indikator SPM, hasilnya sebagai berikut :

INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah indikator cakupan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh indikator yang ada}} \times 100$	100%	71.36 %	71.36 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2022 belum mencapai target 100%, akan tetapi cakupan ini lebih tinggi dibandingkan cakupan pelayanan kesehatan pada Tahun 2021.

**Tabel Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau
Tahun 2019-2022**

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET SPM NASIONAL	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	81.45%	80.28%	76.20%	78.13%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	74.92%	91.60%	68.90%	73.91%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100%	92.00%	66.32%	75.60%	73.98%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	65.50%	57.07%	57.60%	72.65%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	78.96%	40.08%	44.20%	65.35%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	24.44%	31.54%	39.90%	79.69%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	70.20%	14.61%	48.80%	53.96%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100%	100.00%	13.29%	82.48%	76.62%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100.00%	56.81%	89.10%	76.68%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100.00%	53.95%	74.30%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	100.00%	88.50%	97.04%	44.29%

12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100.00%	19.77%	55.67%	61.04%
----	--	------	---------	--------	--------	--------

Indikator SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu :

- Anggaran kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SPM masih kurang. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malinau memiliki 17 Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan. Dari 17 Puskesmas tersebut, hanya satu Puskesmas yang belum terakreditasi, yang dapat diartikan bahwa perencanaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Usulan rencana kegiatan Puskesmas agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan ke masyarakat lebih besar dibanding pagu indikatif yang ditetapkan oleh daerah. Terdapat dua sumber pembiayaan Puskesmas, yaitu dana operasional dari APBD dan dana Bantuan Operasional Kesehatan dari APBN. Meskipun anggaran kesehatan telah mencapai 10% dari APBD tetapi ini masih kurang untuk dapat mencapai target SPM 100%. Adapun dana desa yang dikelola oleh setiap desa di Kabupaten Malinau masih belum maksimal dialokasikan untuk bidang kesehatan.
- Sumber Daya Manusia Kesehatan di beberapa Puskesmas masih kurang. Terbatasnya jumlah ASN kesehatan di Puskesmas sebetulnya sudah diupayakan dengan penambahan tenaga kontrak kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB agar dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal di setiap Puskesmas. Akan tetapi dengan keterbatasan dana yang dikelola oleh APBD masih terdapat kekurangan tenaga di beberapa Fasilitas Kesehatan. Selain itu untuk beberapa Puskesmas di wilayah perbatasan masih tidak ada peminat untuk tenaga kesehatan mendaftar. Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan dalam upaya mencapai target SPM menjadi kurang.

- Masih kurangnya monitoring dan evaluasi ke Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.

Untuk meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2023, maka upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB yaitu :

- Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Melakukan advokasi terhadap pemerintah desa agar dapat mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pembangunan di bidang kesehatan.
- Menetapkan SK penanggung jawab dan tim terpadu pembinaan dan pengawasan Puskesmas untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas baik manajemen, UKM maupun UKP.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dan evaluasi capaian program kegiatan per triwulan oleh Dinas Kesehatan PPKB baik secara tatap muka maupun online melalui zoom meeting.
- Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih ditingkatkan.

4. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1.000 hari pertama kehidupannya.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti

menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

$$\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Anak Balita Stunting pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Anak Balita yang ditimbang}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan intervensi spesifik dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi penyakit menular, hingga manajemen terpadu balita sakit. Sedangkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama sejumlah kementerian lain melakukan intervensi sensitif. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan.

Prevalensi stunting di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 yaitu 14.93%, dengan jumlah anak balita stunting adalah 666 orang dan jumlah anak balita pada tahun 2022 yaitu 4461 orang.

Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan upaya intervensi pencegahan stunting pada perempuan sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk

remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk bu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendigitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu

Berikut ini adalah data Prevalensi Stunting di Kabupaten Malinau dari tahun 2018-2022:

Tabel Prevalensi Stunting di Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022

TAHUN	PREVALENSI STUNTING
2018	17.24%
2019	16.41%
2020	14.47%
2021	11.04%
2022	14.93%

5. **Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran (ASFR)**

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

Target ASFR per 1000 Kelahiran di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 adalah 12 per 1000 Kelahiran, sedangkan capaian ASFR Umur 15-19 Tahun di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah 25 per 1000 Kelahiran.

Sebagai perbandingan bahwa Capaian Indikator ASFR 15-19 di Kalimantan Timur pada Tahun 2022 yaitu Terdapat 22-23 kelahiran di antara 1.000 perempuan umur 15-19 tahun. Capaian Indikator ASFR 15-19 di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah 27,10 per 1000 Kelahiran, sedangkan targetnya adalah 13 per 1000 Kelahiran.

Dalam studi kelahiran menurut kelompok umur, salah satu yang menjadi perhatian adalah ASFR kelompok umur 15-19 tahun, karena ASFR kelompok umur merepresentasikan fertilitas usia remaja dan merupakan salah satu indikator SDGs.

Tingginya ASFR umur 15-19 tahun menjadi masalah karena mengindikasikan banyak yang menjadi ibu di usia muda.

Tabel Capaian Indikator ASFR 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2021

TAHUN	KALTIM		KALTARA	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2021	15	19,7	13	27,10

Capaian ASFR di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan melebihi nilai ASFR di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tentang Program Keluarga Berencana, bahwa program KB tidak hanya dua anak, tapi kelahiran yang dikendalikan dan direncanakan dengan tetap memperhatikan kesehatan ibu melahirkan.

6. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1.000 hari pertama kehidupannya.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

$$\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Anak Balita Stunting pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Anak Balita yang ditimbang}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan intervensi spesifik dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi penyakit menular, hingga manajemen terpadu balita sakit. Sedangkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama sejumlah kementerian lain melakukan intervensi sensitif. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan.

Prevalensi stunting di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 yaitu 14.93%, dengan jumlah anak balita stunting adalah 666 orang dan jumlah anak balita pada tahun 2022 yaitu 4461 orang.

Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan upaya intervensi pencegahan stunting pada perempuan sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendigitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu

7. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran (ASFR)

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

Target ASFR per 1000 Kelahiran di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 adalah 12 per 1000 Kelahiran, sedangkan capaian ASFR Umur 15-19 Tahun di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah 25 per 1000 Kelahiran.

Sebagai perbandingan bahwa Capaian Indikator ASFR 15-19 di Kalimantan Timur pada Tahun 2022 yaitu Terdapat 22-23 kelahiran di antara 1.000 perempuan umur 15-19 tahun. Capaian Indikator ASFR 15-19 di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah 27,10 per 1000 Kelahiran, sedangkan targetnya adalah 13 per 1000 Kelahiran.

Dalam studi kelahiran menurut kelompok umur, salah satu yang menjadi perhatian adalah ASFR kelompok umur 15-19 tahun, karena ASFR kelompok umur merepresentasikan fertilitas usia remaja dan merupakan salah satu indikator SDGs. Tingginya ASFR umur 15-19 tahun menjadi masalah karena mengindikasikan banyak yang menjadi ibu di usia muda.

Tabel Capaian Indikator ASFR 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2021

TAHUN	KALTIM		KALTARA	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2021	15	19,7	13	27,10

Capaian ASFR di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan melebihi nilai ASFR di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tentang Program Keluarga Berencana, bahwa program KB tidak hanya dua anak, tapi kelahiran yang dikendalikan dan direncanakan dengan tetap memperhatikan kesehatan ibu melahirkan.

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk Belanja Langsung pada OPD Dinas Kesehatan PP dan KB sebagai berikut, dari total anggaran OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun 2022 Rp. 126.691.000.077,00 Realisasi keuangan yaitu Rp. 114.097.654.937 (90.06 %) dengan sisa anggaran yaitu Rp. 13.030.545.140,00

Capaian realisasi keuangan tidak dapat mencapai 100% dikarenakan pada OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun 2022 mengalami beberapa pergeseran anggaran sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, baik pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun kegiatan ke lapangan menjadi terlambat, terutama untuk kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Selain itu, dikarenakan jumlah Covid-19 menurun, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan covid-19 tidak dilaksanakan.

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN MALINAU

N O	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHU N 2019	TAHU N 2020	TAHU N 2021	TAHU N 2022	TAHU N 2019	TAHU N 2020	TAHU N 2021	TAHU N 2022	
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapat yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	81.45	80.28	81	84	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kabu dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	74.92	91.6	92	95	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19
3	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun satu tahun	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100	100	100	100	92	66.32	67	70	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

4	Persentase balita 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ₁ + jumlah Balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ₂ + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ₃	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	65.5	57.07	58	61	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19
---	---	----------------------------	----------------------------	-----	-----	-----	-----	------	-------	----	----	---

5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	78.96	40.08	41	44	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19
6	Persentase orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100	100	100	24.44	31.54	32	35	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

	kurun waktu satu tahun											
7	Persentase warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	100	100	100	70.2	14.61	15	18	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

8	Persentase penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	100	100	100	100	13.29	14	17	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19
9	Persentase penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	56.81	17	20	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

	kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun											
10	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	100	100	100	53.95	54	57	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

11	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	100	100	100	100	88.5	89	92	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	19.77	20	23	Masih belum bisa mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyusun program kegiatan yang akan datang (5 tahun ke depan) yang dituangkan dalam Renstra Pembangunan bidang Kesehatan dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisa lingkungan internal melalui berbagai kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*) serta mengidentifikasi dan menganalisa lingkungan eksternal melalui berbagai peluang (*Opportunity*) serta ancaman (*Treat*) yang dimiliki dan dimaksimalkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Kesehatan PPKB yaitu Penanganan stunting di tahun 2024 harus kurang dari 14%.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yakni “Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan “, maka yang menjadi prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Maka yang menjadi prioritas Bidang Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PRIORITAS RKPD	PRIORITAS OPD	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan UKP dan UKM	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
		2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	4) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3. Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan	6) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang baik, merata dan bermutu merupakan hak dasar rakyat dan sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Status kesehatan masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu daerah dalam usaha pemenuhan hak dasar rakyat. Manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan modal utama dalam pembangunan.

Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah; serta mendorong kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

2.4. 1 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diperoleh dari hasil Musrenbang di setiap Kecamatan. Program dan kegiatan yang diusulkan berasal dari para pemangku kepentingan baik dari tingkat RT, desa maupun Kecamatan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Malinau

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI (DESA)	VOLUME
1	Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu	Desa Tanjung Keranjang	RT. 2	1 Unit
2	Pembangunan Pagar pustu tajan dan Kantor Desa	Masyarakat	Sembuak Warod	1 Paket
3	Perlengkapan Alat-alat Kesehatan	Pengguna Alat-alat kesehatan	Seruyung	1 Paket
4	Pembuatan Pagar Pustu dan Lanscep	Desa Sentaban	Sentaban	1 Paket

5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Kuala Lapang	Kuala Lapang	1 Kegiatan
6	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Kuala Lapang	Kuala Lapang	1 Unit
7	Pengadaan Tabung Gas	Desa Long Kenipe	Long Kenipe	2 Unit
8	Pengadaan Tempat Tidur Pasien	Desa Long Kenipe	Long Kenipe	1 Unit
9	Pengadaan Alat Cek Gula Darah, Asam Urat	Desa Long Kenipe	Long Kenipe	1 Paket
10	Pengadaan Kursi Roda	Desa Long Kenipe	Long Kenipe	2 Unit
11	Pengadaan Timbangan Dewasa	Desa Long Kenipe	Long Kenipe	1 Unit
12	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Masyarakat pengguna layanan	Desa Sempayang	1 unit
13	Pembuatan Pagar Beton Puskesmas	Puskesmas Sesua	Desa Sesua RT. 05	1 Paket
14	Pemagaran Rumah Dinas Paramedis	Rumdin Paramedia	Desa Sesua RT. 05	1 Paket
15	Drainase Lingkungan Rumah Dinas Paramedis	Rumdin Paramedia	Desa Sesua RT. 05	1 Paket
16	Pembangunan Siring Beton Puskemas	masyarakat	PKM Pulau Sapi	55 m
17	Pembangunan Pustu 6x10 Meter	Gereja	Temalang hulu	1 paket
18	Kegiatan Pemeriksaan Gol.Darah kepada Masyarakat	Masyarkat	Tulid Fasan	1 Kali
19	Pembangunan Gedung Pustu	Postu	Desa Lidung Kemenci	1 Paket
20	Perlengkapan Pustu Desa Paking	Postu	Paking	1 Paket
21	Pembangunan Pagar Puskemas Sungai Boh	Masyarakat	Dumu Mahak	1 Kegiatan
22	Pengadaan Genset PUSKESMAS Sungai Boh	Masyarakat	Mahak Baru	1 Paket
23	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Masyarakat	Mahak Baru	1 Tahun
24	Pembangunan Rumah Dinas PUSTU	Tenaga Kesehatan	Desa Agung Baru	2 Unit
25	Pustu Beton 12X20	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Desa Laban Nyarit	1 Unit
26	Pembangunan Rumah sakit Pratama	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	RT 07 Long Loreh	1 Paket

27	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Tenaga kesehatan	Long Loreh	2 Unit
28	Pengadaan Mobil Ambulance	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Paya Seturan	1 Unit
29	Pos Jaga R.S PRATAMA	Masyarakat	Langap	1 unit
30	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	Tenaga Medis (Dokter)	Langap	1 paket
31	Penimbunan Lahan R.S PRATAMA	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Langap	1 paket
32	Pembangunan Pagar dan Gapura R.S PRATAMA	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Langap	2 paket
33	Pengadaan Mobil Jenazah R.S PRATAMA	Masyarakat pengguna layanan mobil Jenazah	Langap	1 unit
34	Pengadaan Alat Penghancur Limbah Rumah Sakit	Pengguna alat penghancur limbah Rumah Sakit	Langap	1 unit
35	Pengembangan R.S PRATAMA	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Langap	1 paket
36	Penambahan Tenaga Perawat dan Bidan	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Batu Kajang	2 Orang
37	Pengadaan Ambulance	Pengguna layanan kesehatan	Puskesmas Sehati	1 Unit
38	Pembangunan Garasi Ambulance Puskesmas Sehati	Pengguna layanan kesehatan	RT 2	4 x 6
39	Bidan PNS Puskesmas Sehati yang menetap	Pengguna layanan kesehatan	Punan Gong Solok	1 orang
40	Pembangunan Konstruksi dinding Penahan Tanah PKM Sehati Gong Solok	Pengguna layanan kesehatan	Punan Gong Solok	1 Paket
41	Penambahan Tenaga Kesehatan	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Punan Adiu	1 orang
42	Penambahan Tenaga Medis Perawat PNS di Puskesmas	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Puskesmas Setulang	2 Orang
43	Semenisasi Halaman Depan Puskesmas Setulang	Masyarakat	Puskesmas Setulang	1 Paket
44	Semenisasi Halaman Depan UGD dan Parkiran Puskesmas Setulang	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Puskesmas Setulang	1 Paket
45	Rehab Rumah Dinas Staf PKM	Staf PKM	Puskesmas Setulang	1 Paket
46	Landscape (Siring) PKM Setulang	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Puskesmas Setulang	1 Paket
47	Pembangunan Mes Perawat	Perawat	Metut	1 Unit

48	Pemagaran Puskesmas	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Metut	1 Unit
49	Rehab Plafon Puskesmas	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Metut	1 Unit
50	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	Tenaga Medis (dokter)	Metut	1 Unit
51	Penambahan Tenaga Medis (dokter)	Tenaga Medis (dokter)	Metut	
52	Penambahan Tenaga Perawat dan Bidan	Masyarakat	Nahakramo	2 Orang
53	Pengadaan Ambulance	Pengguna layanan amnulance	Nahakramo	1 Unit
54	Rehabilitasi pustu	Masyarakat	Tanjung Nanga	1 Unit
55	Penambahan Tenaga Perawat dan Bidan	Masyarakat	Long Lake (Luwe)	2 Orang
56	Rehabilitasi pustu	Masyarakat	Long Lake	1 Unit
57	Pembangunan WC Pustu	Masyarakat	Long Lake	1 Unit
58	Pengadaan ketinting Pustu	Masyarakat	Long Lake	1 Unit
59	Penambahan Tenaga Perawat dan Bidan	Masyarakat	Long Rat	2 Orang
60	Penambahan Tenaga Perawat dan Bidan	Masyarakat	Halanga	2 Orang
61	Penambahan Tenaga Bidan	Masyarakat	Long Jalan	1 Orang
62	Rehabilitasi pustu	Masyarakat	Long Jalan	1 Unit
63	Penambahan Tenaga Perawat dan Bidan	Masyarakat	Punan Mirau	2 Orang
64	Rehabilitasi pustu	Masyarakat	Punan Mirau	1 Unit
65	Rehab Rumah Dinas Pustu	Tenaga Medis	Lg. Semamu	1 Paket
66	Pembangunan Rumah Dinas Perawat	Tenaga Medis	Lg. Semamu	1 Paket
67	Rehab PUSTU Desa	Masyarakat	Lg Fala	1 Paket
68	Pembangunan Gedung Posyandu	Balita dan Lansia	Lg Mekatip	1 Paket
69	Penambahan Tenaga Kesehatan PNS (Apoteker 1, Perawat 4, Bidan 3 dan Admin 1)	Masyarakat	Lg Barang	9 Orang

70	Penambahan tenaga Perawat	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Lg Simau	1 org
71	Penambahan tenaga Perawat	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Lg Silit	1 org
72	Penambahan Perawat dan Bidan Desa Lung Semamu	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Lg Semamu	1 Paket
73	Pembuatan Gudang Obat	Masyarakat	Puskesmas	1 unit
74	Tenaga Bidan	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Desa Long Pua	
75	Rehab PUSTU	Masyarakat	Desa Long Pua	1 paket
76	Pembangunan rumah dinas PUSTU	Tenaga kesehatan	Desa long aran	3 unit
77	Tenaga kesehatan (bidan)	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Desa Long Bena	1 orang
78	Pengadaan Kursi Lipat Puskesmas	Masyarakat/pasien	Long Alango	50 Unit
79	Pengadaan Mobil Ambulance	Masyarakat	Long Alango	1 Unit
80	Rehab Ruang Bersalin	Pasien	Long Alango	1 Lantai
81	Pagar Keliling Bangunan PKM	Puskesmas	Long Alango	150 m
82	Rehab Total Dermaga PKM	PKM/Masyrakat	Long Alango	1 Unit
83	Rehab Gedung Puskesmas Long Alango	Masyarakat	Long Alango	1 Paket
84	Rehab Rumah Paramedis Long Alango	Tenaga PKM	Long Alango	2 Unit
85	Rehab Rumah Dinas Dokter	Rumdin Dokter	Long Alango	1 Paket
86	Pembangunana Rumdis Paramedis (Couple)	Rumdin Tenaga Kesehatan	Long Alango	3 Unit
87	Pembangunan IPAL Puskesmas Long Alango	Puskesmas Long Alango	Long Alango	1 Paket
88	Pagar Keliling PUSTU	Pustu Long Uli	Long Uli	1 Paket
89	Pembangunan Rumdis Pustu	Tenaga Kesehatan PUSTU	Long Tebulo	1 Unit
90	Pembangunan SPAL Pustu Long Kemuat	Pustu Long Kemuat	Long Kemuat	50 M
91	Pembangunan Pagar Pustu	Pustu Long Berini	Long Berini	100 M

92	Pembangunan Gedung Permanen Pustu	Masyarakat	Apau Ping	1 Paket
93	Pembangunan Rumah Dinas Pustu	Tenaga Kesehatan PUSTU	Apau Ping	15x25 M
94	Pembangunan Rumah Dinas Bagi Tenaga Medis RSP Long Ampung	Tenaga Medis	RS. Pratama Long Ampung	9x20 Meter
95	Pengadaan Kabel Listrik utk Rumah Sakit Pratama Long Ampung	Siswa	RS. Pratama Long Ampung	2.000 Meter
96	Pembangunan Pustu Permanen	Siswa	Lidung Payau	4 Lokal
97	Pembangunan Rumah Dinas Pustu Sungai Barang	Siswa	Sungai Barang	1 Unit
98	Pengadaan Lemari Obat Pustu Sungai Barang	Siswa	Sungai Barang	1 Unit
99	Pembangunan Pustu	Masyarakat	Sai Anai	1 Paket
100	Penambahan Tenaga Kesehatan	Puskesmas	Data Dian	1 Orang
101	Pembangunan Rumah Dinas PUSTU	Tenaga Kesehatan	Desa Agung Baru	2 Unit
102	Pengadaan ambulance puskesmas	Masyarakat pengguna ambulance	Long Pada	1 Unit
103	Pembangunan Rumah Dinas Perawat	Perawat	Long Pada	1 Paket
104	Tempat Tidur Pasien dan Oksigen	Pasien/ masyarakat pengguna layanan kesehatan	Long Pada	1 Paket
105	Pembangunan Pustu	Masyarakat pengguna layanan kesehatan	Long Ranau	1 Paket
106	Perahu ambulan + Ketinting	Masyarakat	Long Titi	1 Unit

Pokir DPRD

NO	USULAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/LOKASI	VOLUME
1.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU PUSTU AGAR AKSES PENGOBATAN LEBIH DEKAT	DESA SENGAYAN, KECAMATAN MALINAU SELATAN	1 PAKET
2.	PENGADAAN MOBIL PUSKESMAS UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIANSI PUSKESMAS	DESA SENGAYAN, KECAMATAN MALINAU SELATAN	

3.	PERLU ADANYA PENINGKATAN TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN DI DESA METUT	DESA METUT, KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU	1 PAKET
4.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS UNTUK PERAWAT	DESA METUT, KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU	1 PAKET
5.	PENAMBAHAN/MENDATANGK AN DOKTER UMUM KEMBAKI DAN PENGADAAN HARUS SEGERA DILAKSANAKAN	DESA LONG PUJUNGAN, KECAMATAN PUJUNGAN	1 PAKET
6.	REHAB PUSTU DI DESA SENTABAN	DESA SENTABAN	1 PAKET
7.	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENUNJANG DIAGNOSA	KABUPATEN MALINAU	1 PAKET
8.	PENGADAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KECAMATAN SUNGAI TUBU	
9.	PENGADAAN AMBULANCE DI SUNGAI TUBU	KECAMATAN SUNGAI TUBU	
10.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	SINGAI TERANG	2 UNIT
11.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	DESA LONG SIMAU	1 UNIT
12.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	KECAMATAN SUNGAI TUBU, DESA LONG PADA	1 PAKET
13.	PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG PUSTU	DESA LONG BISAI. KEC. MENTARANG	1 PAKET
14.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS BAGI LANSIA (POLIKLINIK LANSIA)	15 KECAMATAN DI KABUPATEN MALINAU	
15.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	15 KECAMATAN DI KABUPATEN MALINAU	
16.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KELENGKAPAN FASILITAS BAGI IBU HAMIL	(KECAMATAN MENTARANG HULU; SUNGAI TUBU; APAU KAYAN; PUJUNGAN; BAHAU HULU)	
17.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KELENGKAPAN FASILITAS BAGI IBU	(KECAMATAN MENTARANG HULU; SUNGAI TUBU; APAU KAYAN; PUJUNGAN; BAHAU HULU)	

18.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	DESA DAN KECAMATAN DI PEDALAMAN/ PERBATASAN	
19.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	DESA DAN KECAMATAN DI PEDALAMAN/ PERBATASAN	
20.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	15 KECAMATAN DI KABUPATEN MALINAU	
21.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	15 KECAMATAN DI KABUPATEN MALINAU	
22.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	KEC. MALINAU KOTA; KEC. MALINAU UTARA; KEC. MENTARANG; KEC. MALINAU BARAT)	
23.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KECAMATAN BAHAU HULU DESA LONG ULI	
24.	1 UNIT AMBULAN JENAZAH UNTUK RUMAH SAKIT PRATAMA LANGAP MALINAU SELATAN	DESA LANGAP RT 06 MALINAU SELATAN	1 UNIT MOBIL AMBULAN JENAZAH
25.	REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAH SESUAI BANGUNAN GEDUNG UTK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH/KOTA	KEC.KAYAN HULU DESA LONG NAWANG	
26.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KEC. KAYAN HULU DESA LONG NAWANG	
27.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KEC. PUJUNGAN	
28.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	KEC. KAYAN SELATAN DESA LIDUNG PAYAU	
29.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	KEC. KAYAN HULU DESA LONG BETAOH	
30.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KEC. KAYAN HULU	2 UNIT
31.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	KEC. BAHAU HULU, DESA APAU PING	
32.	PEMBANGUNAN UNTUK FASILITAS GEDUNG PENGOBATAN MASYARAKAT	AGAR TERSEDIA PEMBANGUNAN UNTUK FASILITAS GEDUNG PENGOBATAN MASYARAKAT KEC. MALINAU SELATAN	

33.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	RIAN TUBU	
34.	PENGADAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KECAMATAN SUNGAI TUBU, DESA LONG TITI	
35.	PENGADAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	DESA LUNG MEKATIF	
36.	PENGADAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KECAMATAN MENTARANG HULU DESA LUNG PALA, KECAMATAN SUNGAI TUBU LONG TITI	2 ORANG

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKPD Kabupaten Malinau merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Utara, karena itu RKPD harus mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, sehingga tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sebagai satu kesatuan NKRI.

a. Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020 – 2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemerintah perlu menyusun RKP yang memuat arah kebijakan nasional secara tahunan. RKP 2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

Rencana Kerja Pemerintah 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Pencapaian sasaran tersebut diindikasikan dengan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, yaitu :

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3-5,9
- Persentase Penduduk Miskin (%) 7-8
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,3-6
- Indeks Pembangunan Manusia (nilai) 73,29-73,35

- Ginie Ratio (nilai) 0,375-0,378

b. Telaahan Terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten Malinau merupakan bagian dari wilayah provinsi Kaltara dengan wilayah terluas di Kalimantan utara. Sebagai bagian dari provinsi, kabupaten malinau harus ikut andil dalam upaya mewujudkan visi misi Kaltara yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan.

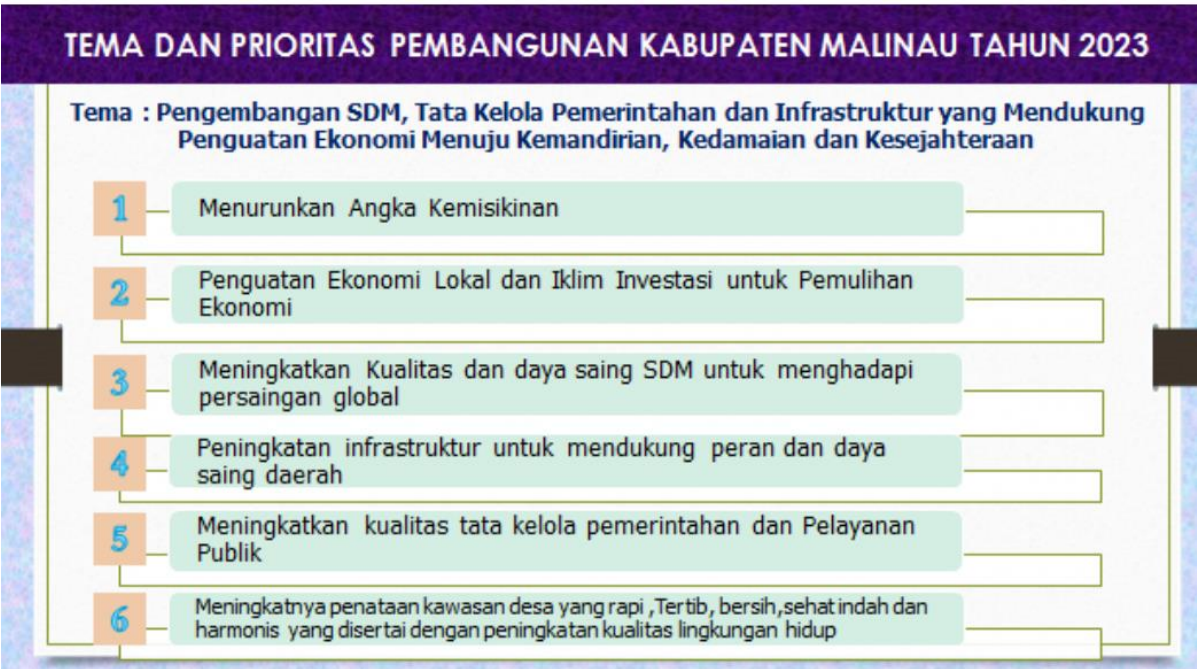
3.2 Tujuan sasaran, Program dan Rencana Kerja SKPD

Dengan mengusung Tema pembangunan daerah tahun 2024 yakni “Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan, diharapkan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik pasca pandemi ini.

Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis. Prioritas tersebut dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau juga diselaraskan dengan arahan dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknis maupun non teknis. Penentuan prioritas pembangunan ini merupakan suatu yang penting sebagai asar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan Arah kebijakan RPJMD tahun 2021- 2026, arahan pemerintah pusat dan provinsi yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori, serta Isu strategis baik global/nasional/daerah, maka yang menjadi prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Prioritas pembangunan di atas juga disusun dengan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2022, hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah serta mempertimbangkan Visi misi Kabupaten Malinau.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Dengan diketahuinya tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Malinau akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan utama yaitu **Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang bermutu, merata dan terjangkau.**

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi Kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond*. Guna memenuhi Kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
2. Terkendalinya angka kelahiran



TUJUAN & SASARAN DINAS KESEHATAN PPKB 2021-2026



TUJUAN

“Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang bermutu, merata dan terjangkau

SASARAN

- 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
- 2) Terkendalnya angka kelahiran

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI,
DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL”**

Misi Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2025 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.**
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Misi yang akan dicapai oleh Dinkes PPKB adalah dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

2) Pencapaian SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa

Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan SDG's yang berkaitan dengan kesehatan adalah tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak.

3) Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- 4) Permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yang dijelaskan dalam pohon masalah di bawah ini



- b. Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 sebagai berikut :
- 1) Di dalam Renja 2024, Dinkes PPKB mempunyai dua urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

2) Jumlah Program pada Tahun 2024 yaitu 8 (delapan) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana
8. Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

T.A 2024 dijelaskan dalam Tabel T-C. 33 dibawah ini.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI/KABUPATEN : KALIMANTAN UTARA/MALINAU
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.00.0.00.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				52,739,528,836.00				52,739,528,836.00
1.02.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				950,000,000.00				950,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				950,000,000.00				950,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinkes PPKB	1 laporan	600,000,000.00	APBD		1 laporan	600,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinkes PPKB	1 paket	350,000,000.00	APBD		1 paket	350,000,000.00
1.02.02.0.00.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan di Kabupaten yang sesuai standar		81%	50,039,528,836.00			81%	50,039,528,836.00
1.02.02.2.01.00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	17 Puskesmas, 2 RS Pratama di Kab. Malinau	90%	20,000,000,000.00			90%	20,000,000,000.00
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Pujungan, Alango, Sungai Boh, KAB. MALINAU	3 unit	8,000,000,000.00	DAK	Musrenbang	3 unit	8,000,000,000.00
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lain yang dibangun	Sengayan, Laban Nyarit, KAB. MALINAU	2 unit	1,000,000,000.00	DAK	Inisiatif OPD	2 unit	1,000,000,000.00
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumdin nakes yang dibangun	Long Alango, RSP Long Ampung, KAB. MALINAU	2 unit	1,000,000,000.00	DAK	Inisiatif OPD, Musrenbang	2 unit	1,000,000,000.00

1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana prasarana dan alkes yang telah dilakukan rehab dan pemeliharaan oleh Puskesmas	Long Nawang	2 unit	1,000,000,000.00	DAK	Musrenbang	2 unit	1,000,000,000.00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Faskes lainnya	Lidung Payau, Apau Ping, KAB. MALINAU	2 unit	1,000,000,000.00	APBD, DAK Fisik		2 unit	1,000,000,000.00
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Long Sule, Long Sule, Kec. Kayan Hilir	1 unit	300,000,000.00	APBD, DAK Fisik		1 unit	300,000,000.00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Malinau, Malinau Seberang, Tanjung Lapang, Loreh, Metut, Sungai Boh, KAB. MALINAU	6 unit	2,000,000,000.00	DAK	Inisiatif OPD, Musrenbang	6 unit	2,000,000,000.00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang disediakan	Malinau, KAB. MALINAU	14 unit	2,000,000,000.00	DAK		14 unit	2,000,000,000.00
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/Regional Maintainance center	Malinau	14 unit	100,000,000.00	DAK	Inisiatif OPD, Musrenbang	14 unit	100,000,000.00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah Obat, Vaksin yang disediakan	Puskesmas dan RS Pratama	1 paket	1,100,000,000.00	APBD dan DAK	Inisiatif OPD	1 paket	1,100,000,000.00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	Puskesmas dan RS Pratama	1 paket	2,000,000,000.00	APBD dan DAK	Inisiatif OPD	1 paket	2,000,000,000.00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara sesuai standar	Malinau	17 unit	300,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	17 unit	300,000,000.00

1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas ksehatan lainnya	jumlah Alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta fasilitas ksehatan lainnya	Malinau	1 paket	200,000,000.00	APBD, DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 paket	200,000,000.00
1.02.02.2.02.00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan	15 Kecamatan, 17 Puskesmas, 2 RS Pratama di Kab. Malinau	100%	29,739,528,836.00			100%	29,739,528,836.00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Kecamatan di Kab. Malinau	1847 orang	2,890,673,630.00	APBD, DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1847 orang	2,890,673,630.00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Kecamatan di Kab. Malinau	1763 orang	624,104,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1763 orang	624,104,000.00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Kecamatan di Kab. Malinau	1679 orang	50,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1679 orang	50,000,000.00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Kecamatan di Kab. Malinau	7332 orang	150,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	7332 orang	150,000,000.00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Kecamatan di Kab. Malinau	6994 orang	720,350,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	6994 orang	720,350,000.00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Kecamatan di Kab. Malinau	47161 orang	100,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	47161 orang	100,000,000.00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Malinau	4678 orang	375,555,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	4678 orang	375,555,000.00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Malinau	12887 orang	150,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	12887 orang	150,000,000.00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Malinau	1035 orang	100,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1035 orang	100,000,000.00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Malinau	163 orang	251,220,000.00	APBD, DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	163 orang	251,220,000.00

1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Malinau	1620 orang	100,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1620 orang	100,000,000.00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Malinau	2276 orang	100,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	2276 orang	100,000,000.00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Malinau	1 dokumen	50,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 dokumen	50,000,000.00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	15 Kecamatan di Kab. Malinau	18 dokumen	268,400,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	18 dokumen	268,400,000.00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Kecamatan di Kab. Malinau	18 dokumen	1,567,928,000.00	APBD, DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	18 dokumen	1,567,928,000.00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Kecamatan di Kab. Malinau	1 dokumen	665,137,200.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 dokumen	665,137,200.00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Malinau	1 dokumen	300,000,000.00	APBD, DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 dokumen	300,000,000.00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Malinau	18 dokumen	1,118,100,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	18 dokumen	1,118,100,000.00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokume hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Malinau	1 dokumen	122,660,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	122,660,000.00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan		1 dokumen	192,620,000.00	DAK Non Fisik		1 dokumen	192,620,000.00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		1 dokumen	50,000,000.00	APBD, DAK Non Fisik		1 dokumen	50,000,000.00

1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Malinau	18 dokumen	4,042,945,006.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	18 dokumen	4,042,945,006.00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Malinau	1 dokumen	10,290,392,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	10,290,392,000.00
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	jumlah orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		100 orang	100,000,000.00	APBD, DAK Non Fisik		100 orang	100,000,000.00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		1 dokumen	150,000,000.00	APBD, DAK Non Fisik		1 dokumen	150,000,000.00
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melaksanakan konsultasi jarak jauh melalui layanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Malinau	5 Puskesmas	100,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	5 Puskesmas	100,000,000.00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Langap	1 dokumen	500,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	500,000,000.00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Long Ampung	1 dokumen	800,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	800,000,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Malinau Kota	1 dokumen	381,648,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	381,648,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Malinau Seberang	1 dokumen	357,554,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	357,554,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Tanjung Lapang	1 dokumen	256,362,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	256,362,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Pulau Sapi	1 dokumen	262,080,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	262,080,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Setulang	1 dokumen	188,342,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	188,342,000.00

1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Sehati	1 dokumen	145,805,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	145,805,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Loreh	1 dokumen	294,270,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	294,270,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Long Alango	1 dokumen	174,256,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	174,256,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Pujungan	1 dokumen	207,035,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	207,035,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Long Ampung	1 dokumen	184,656,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	184,656,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Long Nawang	1 dokumen	235,800,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	235,800,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Sungai Boh	1 dokumen	222,788,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	222,788,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Data Dian	1 dokumen	147,923,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	147,923,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Long Sule	1 dokumen	117,670,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	117,670,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Long Berang	1 dokumen	235,800,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	235,800,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Sesua	1 dokumen	177,911,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	177,911,000.00
1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	Jumlah dokumen Penyediaan Operasional Puskesmas	Metut	1 dokumen	219,544,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	219,544,000.00
1.02.02.2.03.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan faskes dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Malinau	86%	300,000,000.00			86%	300,000,000.00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Malinau	1 dokumen	100,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	100,000,000.00

1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Malinau	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	100,000,000.00
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	Malinau	1 unit	100,000,000.00	DAK	Inisiatif OPD	1 unit	100,000,000.00
1.02.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan SDM di faskes	Malinau	81%	700,000,000.00			81%	700,000,000.00
1.02.03.2.02.00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM di faskes	Malinau	100%	200,000,000.00			100%	200,000,000.00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Malinau	1 dokumen	200,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 dokumen	200,000,000.00
1.02.03.2.03.00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan faskes dengan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM	Malinau	100%	500,000,000.00			100%	500,000,000.00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Malinau	20 org	500,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	20 org	500,000,000.00
1.02.05.0.00.00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Malinau	100%	300,000,000.00			100%	300,000,000.00
1.02.04.2.06.00	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi makanan minuman industri rumah tangga		Malinau	33%	300,000,000.00			33%	300,000,000.00
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan sarana produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Malinau	5 unit	300,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	5 unit	300,000,000.00

1.02.05.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kecamatan dengan kegiatan advokasi kemitraan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang diadakan	Malinau	100%	750,000,000.00			100%	750,000,000.00
1.02.05.2.01.00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kecamatan dengan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Malinau	100%	100,000,000.00			100%	100,000,000.00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Malinau	1 dokumen	100,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 dokumen	100,000,000.00
1.02.05.2.02.00	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kecamatan yang melaksanakan kegiatan Promotif Preventif	Malinau	100%	350,000,000.00			100%	350,000,000.00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Malinau	1 dokumen	150,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 dokumen	150,000,000.00
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Malinau	5 Keluarga	200,000,000.00	DAK Non Fisik		5 Keluarga	200,000,000.00
1.02.05.2.03.00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Malinau	100%	300,000,000.00			100%	300,000,000.00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Malinau	1 dokumen	300,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 dokumen	300,000,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDK DAN KELUARGA BERENCANA				74,500,228,702.00				74,500,228,702.00

2.14.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja dengan pelayanan administrasi		100%	73,283,938,702.00			100%	73,283,938,702.00
2.14.01.2.02.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN mendapat Gaji dan Tunjangan tepat waktu	DINKES PPKB	100%	70,751,995,702.00			100%	70,751,995,702.00
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	DINKES PPKB	7980 orang	70,751,995,702	APBD	Inisiatif OPD	7980 orang	70,751,995,702
2.14.01.2.06.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	DINKES PPKB	100%	1,258,273,000.00			100%	1,258,273,000.00
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DINKES PPKB	7 Jenis	397,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	7 Jenis	397,000,000.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DINKES PPKB	1 paket	608,273,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 paket	608,273,000.00
2.14.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DINKES PPKB	1 paket	253,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	1 paket	253,000,000.00
2.14.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINKES PPKB	100%	627,670,000.00			100%	627,670,000.00
2.14.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DINKES PPKB	3 Jenis	489,280,000.00	APBD	Inisiatif OPD	3 Jenis	489,280,000.00
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINKES PPKB	12 Jenis	138,390,000.00	APBD	Inisiatif OPD	12 Jenis	138,390,000.00
2.14.01.2.09.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINKES PPKB	100%	646,000,000.00			100%	646,000,000.00
2.14.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak/perizinannya	DINKES PPKB	3 Jenis	356,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	3 Jenis	356,000,000.00
2.14.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah aset yang dipelihara	DINKES PPKB	3 Jenis	290,000,000.00	APBD	Inisiatif OPD	3 Jenis	290,000,000.00
2.14.02.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan program pengendalian penduduk yang dilaksanakan		100%	73,410,000.00			100%	73,410,000.00

2.14.02.2.02.00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan DaerahKab/Kota			73.41%	73,410,000.00			73.41%	73,410,000.00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Malinau	100%	1,890,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	100%	1,890,000.00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah dan dilaporkan	Malinau	1 jenis	71,520,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 jenis	71,520,000.00
2.14.03.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kecamatan yang melaksanakan program KB	Malinau	53%	842,880,000.00			53%	842,880,000.00
2.14.03.2.01.00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kecamatan dengan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Malinau	53%	455,020,000.00			53%	455,020,000.00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Malinau	1 kegiatan	4,380,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 kegiatan	4,380,000.00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kebutuhan program KKBPK	Malinau	4 jenis	25,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	4 jenis	25,000,000.00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah KIE Program KKBPK yang tersedia	Malinau		121,000,000.00	DAK Non Fisik			121,000,000.00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK			5 kegiatan	81,000,000.00			5 kegiatan	81,000,000.00
	Pengendalian Program KKBPK			1 kegiatan	40,000,000.00			1 kegiatan	40,000,000.00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Malinau	4 kegiatan	70,640,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	4 kegiatan	70,640,000.00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	Jumlah kegiatan rapat koordinasi	Malinau	5 kegiatan	234,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	5 kegiatan	234,000,000.00

2.14.03.2.03.00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	53%	60,110,000.00			53%	60,110,000.00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Malinau	1 kegiatan	7,200,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 kegiatan	7,200,000.00
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Malinau	1 kegiatan	45,110,000.00	DAK Non Fisik		1 kegiatan	45,110,000.00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah kegiatan Pembinaan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Malinau	1 kegiatan	7,800,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 kegiatan	7,800,000.00
2.14.03.2.04.00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kecamatan yang dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Malinau	53%	327,750,000.00			53%	327,750,000.00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kebutuhan pembinaan kampung KB	Malinau	3 jenis	327,750,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	3 jenis	327,750,000.00
2.14.04.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE KECAMATAN DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		53%	300,000,000.00			53%	300,000,000.00

2.14.04.2.01.00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kecamatan dengan kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Malinau	53%	300,000,000.00			53%	300,000,000.00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Malinau	1 kegiatan	300,000,000.00	DAK Non Fisik	Inisiatif OPD	1 kegiatan	300,000,000.00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN DINKES PPKB TAHUN 2023					127,239,757,538.00				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

USULAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024
SEMUA USULAN

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUIJI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.177.584.546,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			54.177.584.546,00		
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			950.000.000,00		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			950.000.000,00		
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Paket	350.000.000,00 350.000.000,00	Disetujui	
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dinkes PPKB, KAB. MALINAU)	1 Laporan	600.000.000,00 600.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			35.806.064.546,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			21.600.000.000,00		
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas - Pembangunan Puskesmas	(Pujungan, Alango, Sungai Boh, KAB. MALINAU)	3 Unit	8.000.000.000,00 8.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	(Sengayan, Laban Nyarit, KAB. MALINAU)	2 Unit	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	(Long Alango, RSP Long Ampung, KAB. MALINAU)	2 Unit	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	(Malinau Seberang, Loreh, KAB. MALINAU)	2 Unit	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	(Lidung Payau, Apau Ping, KAB. MALINAU)	2 Unit	1.300.000.000,00 1.300.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	(Long Sule, Long Sule, Kec. Kayan Hilir)	1 Unit	300.000.000,00 300.000.000,00	Disetujui	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	(Malinau, Malinau Seberang, Tanjung Lapang, Loreh, Metut, Sungai Boh, KAB. MALINAU)	6 Unit	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			3.000.000.000,00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- <i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	14 Puskesmas	3.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - <i>Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	14 Puskesmas	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin - <i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	1.100.000.000,00 1.100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai - <i>Pengadaan Bahan Habis Pakai</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	17 Puskesmas	300.000.000,00 300.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya - <i>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksib, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	500.000.000,00 500.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13.906.064.546,00		
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1847 Orang	235.000.000,00 235.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1763 Orang	150.000.000,00 150.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1679 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	7332 Orang	150.000.000,00 150.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	6994 Orang	150.000.000,00 150.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	47161 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	4678 Orang	106.520.000,00 106.520.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	12887 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1035 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiw a Berat - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	163 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1620 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	2276 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	200.000.000,00 200.000.000,00	Disetujui	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUIJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	250.000.000,00 250.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	250.000.000,00 250.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	300.000.000,00 300.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan - <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	124.152.546,00 124.152.546,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus - <i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	250.000.000,00 250.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - <i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	10.290.392.000,00 10.290.392.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - <i>Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	100 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - <i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	150.000.000,00 150.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	5 Unit	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUIJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - <i>Penyediaan Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	(IFK, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			300.000.000,00		
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan - <i>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - <i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet - <i>Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Unit	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			16.550.000.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			16.050.000.000,00		
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - <i>Perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDMK</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	15.850.000.000,00 15.850.000.000,00	Disetujui	
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - <i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	200.000.000,00 200.000.000,00	Disetujui	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000,00		
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - <i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	20 Orang	500.000.000,00 500.000.000,00	Disetujui	
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			300.000.000,00		
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			300.000.000,00		
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - <i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	5 Unit	300.000.000,00 300.000.000,00	Disetujui	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			571.520.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00		
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000,00		
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	(Malinau, KAB. MALINAU)	1 Dokumen	150.000.000,00 150.000.000,00	Disetujui	
	1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	(Malinau, KAB. MALINAU)	5 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			221.520.000,00		
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(KAB. MALINAU)	1 Dokumen	221.520.000,00 221.520.000,00	Disetujui	
	² DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			74.998.218.703,00		
	^{2.14} BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			74.998.218.703,00		
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			74.823.218.703,00		
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.291.275.703,00		
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(MALINAU, KAB. MALINAU)	7980 Orang	72.291.275.703,00 72.291.275.703,00	Disetujui	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.258.273.000,00		
	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Dinkes PPKB, KAB. MALINAU) (MALINAU, KAB. MALINAU)	7 Jenis 1 Paket	1.005.273.000,00 397.000.000,00 608.273.000,00	Disetujui Disetujui	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Paket	253.000.000,00 253.000.000,00	Disetujui	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			627.670.000,00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	(Dinkes PPKB, KAB. MALINAU)	3 Jenis	489.280.000,00 489.280.000,00	Disetujui	
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - <i>Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	(Dinkes PPKB, KAB. MALINAU)	12 Jenis	138.390.000,00 138.390.000,00	Disetujui	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			646.000.000,00		
	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - <i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	(Dinkes PPKB, KAB. MALINAU)	3 Jenis	356.000.000,00 356.000.000,00	Disetujui	
	2.14.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - <i>Pemeliharaan Aset Tetap</i>	(Dinkes PPKB, KAB. MALINAU)	3 Jenis	290.000.000,00 290.000.000,00	Disetujui	
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga - <i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	(Malinau, KAB. MALINAU)	100 %	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - <i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Jenis	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			175.000.000,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			175.000.000,00		
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal - <i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	(MALINAU, KAB. MALINAU)	4 Jenis	25.000.000,00 25.000.000,00	Disetujui	
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK - <i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK</i>	(MALINAU, KAB. MALINAU)	5 Kegiatan	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - <i>Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</i>	(MALINAU, KAB. MALINAU)	4 Kegiatan	- -	Dalam Pembahasan	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUIJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	(MALINAU, KAB. MALINAU)	5 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00	Disetujui	
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			-		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Pengendalian Program KKBPK	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Kegiatan	-	Dalam Pembahasan	
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK - Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Kegiatan	50.000.000,00 50.000.000,00	Disetujui	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			-		
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kotrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Kegiatan	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP - Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	(MALINAU, KAB. MALINAU)	2 Kegiatan	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Pembinaan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Kegiatan	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			-		
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB - Pelaksanaan dan Pengolaan Program KKBPK di Kampung KB	(MALINAU, KAB. MALINAU)	3 Jenis	- -	Dalam Pembahasan	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			-		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-		
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(MALINAU, KAB. MALINAU)	1 Kegiatan	- -	Dalam Pembahasan	
		JUMLAH			129.175.803.249,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja ini juga digunakan untuk melakukan monitoring program pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Malinau.

Penetapan pagu DAK Fisik dan Non Fisik di Renja Tahun 2024 akan mengalami perubahan dikarenakan penetapan pagu DAK Fisik dan Non Fisik untuk Tahun 2024 masih menunggu penetapan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan tersebut sangat tergantung pada komitmen serta kesungguhan para penyelenggara dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan kesehatan.

Malinau, 24 Juli 2023
Kepala Dinas,



Makson, S.Sos., MM, MH
NIP. 196507101998031005